

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014 *jo.* Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik**



**PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B
TRIWULAN II
BULAN APRIL - JUNI 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B**

Disahkan di Baturaja, 3 Juli 2023

Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B,



Hendri Agustian, S.H., M.Hum.
NIP. 19750804 200502 1 001

Ketua Tim Survei,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.
NIP. 19940916 201712 1 004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan semangat Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B sebagai bagian dari perwujudan cita-cita luhur Pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, dengan ini disusun laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Triwulan II Bulan April-Juni 2023.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah dengan melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan Pengadilan. Dalam survei ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument berupa kuisisioner yang diisi tanpa bertatap muka. Survei dilakukan kepada para pengunjung Pengadilan dan para pengguna layanan Pengadilan.

Sebagai pertanggung jawaban kinerja yang dilakukan Tim Survei, maka disusun laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi. Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil.

Semoga hasil survei ini dapat memberikan masukan yang positif untuk Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Semoga laporan ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN GRAFIK	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
BAB 2 METODOLOGI	
2.1. Metode dan Periode Survei.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	7
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	7
2.5. Teknik Analisis Data	8
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	9
BAB 3 INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
3.1. Profil Responden.....	10
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	17
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	18
3.5. Nilai Unsur Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi	18
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Simpulan.....	20
DAFTAR RUJUKAN	21
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN GRAFIK

GAMBAR:

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi	9
--	---

TABEL:

Tabel 1. Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei.....	5
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	9
Tabel 3. Nilai Persepsi Anti Korupsi	9
Tabel 4. Nilai Interval Konversi IPAK Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.....	18
Tabel 5. Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.....	18
Tabel 6. Nilai 3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi	18
Tabel 7. Nilai 3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi	19
Tabel 8. Indeks Per Unsur	20

GRAFIK:

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	10
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden.....	11
Grafik 3. Kelompok Usia Responden	11
Grafik 4. Jenis Layanan Yang Digunakan Responden.....	12
Grafik 5. Jenis Kelamin Responden	12
Grafik 6. Unsur Manipulasi Peraturan	13
Grafik 7. Unsur Penyalahgunaan Jabatan	13
Grafik 8. Unsur Menjual Pengaruh	14
Grafik 9. Unsur Transparansi Biaya	14
Grafik 10. Unsur Biaya Tambahan.....	15
Grafik 11. Unsur Hadiah	15
Grafik 12. Unsur Transparansi Pembayaran	16
Grafik 13. Unsur Pencaloan.....	16
Grafik 14. Unsur Perbuatan Curang.....	17
Grafik 15. Unsur Transaksi Rahasia.....	17
Grafik 16. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari dibuatnya Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya

- manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B;
- Penyiapan bahan berupa:
 - a. Kuesioner elektronik berisi 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi yang dapat diakses melalui aplikasi **SISUPER** melalui link esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098963 pada komputer dengan jaringan internet atau melalui pindai kode batang pada ponsel pintar;
 - b. Kelengkapan sarana dan prasarana berupa perangkat komputer beserta jaringan internet untuk mengakses survei secara elektronik dan pengadaan **acrylic barcode display** berisi tautan kode batang yang ditempatkan di setiap meja layanan PTSP sehingga memudahkan pengunjung mengakses mengisi kuesioner melalui ponsel pintar pribadinya;
 - Penetapan Responden, Lokasi, dan Waktu Pengumpulan Data adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah responden yang menjadi target sasaran survei ini adalah sejumlah minimal 20 (dua puluh) responden setiap bulannya;
 - b. Pengambilan survei ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B dengan tenggang waktu pengumpulan data selama 52 (lima puluh dua) hari kerja yang dimulai sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023;
 - Penyusunan jadwal penyusunan rencana dan pelaksanaan survei.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengisian Kuesioner dilakukan oleh para responden secara mandiri setelah mendapatkan penjelasan dari petugas terlebih dahulu.

Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner tersimpan dalam basis data Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B. Pengujian kualitas dan validitas data dapat dilakukan pada hari Jumat di setiap minggunya untuk mengetahui apakah ada kesalahan pemasukan

data sekaligus memeriksa pemutakhiran data responden.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B pada bulan ini melakukan survei secara Triwulan dengan menggunakan metode evaluasi. Hal ini untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B sudah mencapai target yaitu pelayanan yang **bersih dari korupsi**.

1.4.4. Waktu Pelaksanaan

Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B untuk periode Triwulan II dilaksanakan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023.

BAB 2 METODOLOGI

2.1. Metode dan Periode Survei

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan / masyarakat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan (triwulan). Untuk periode ini, survei dilaksanakan pada Triwulan II Periode 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

Tabel 1. Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei

No.	Rincian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I													

3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I														
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II														
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II														
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II														
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III														
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan III														
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III														
10	Pelaksanaan Survei														

	Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Triwulan IV													

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah kualitas proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner secara online yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengunjung diminta mengunjungi aplikasi

SISUPER melalui link esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098963 baik melalui perangkat komputer yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B atau melalui perangkat pindai kode batang sehingga aplikasi tersebut dapat diakses melalui telepon selular yang dimiliki oleh pengunjung pengadilan.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 52 (lima puluh dua) hari kerja sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 dengan total responden sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh pengawas. Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, menerangkan cara pengisian kuesioner elektronik, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar dimintakan survei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

2.5. Teknik Analisis Data

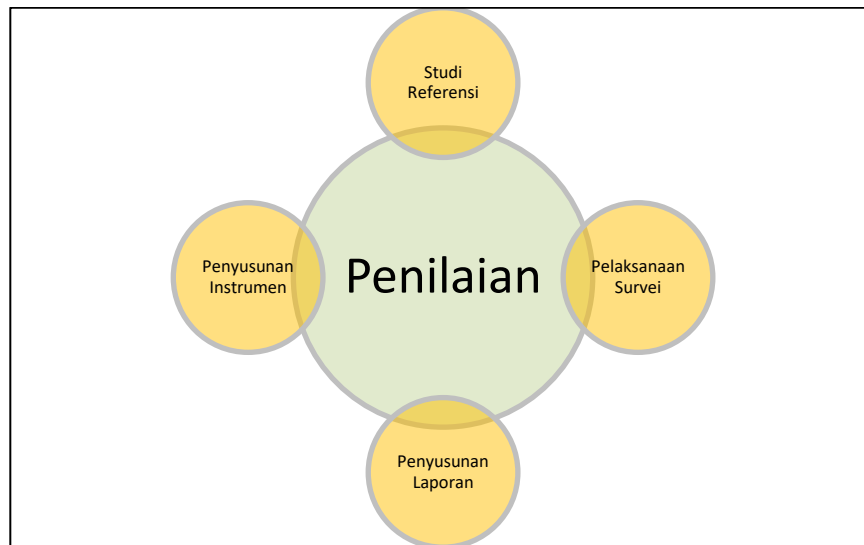
Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik *statistik deskriptif*. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 s.d. 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring* / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara menentukan bobot total dari masing-masing unsur yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dicari bobot rata-rata setiap unsur. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **bersih dari korupsi**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum survei dilaksanakan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan perangkat untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

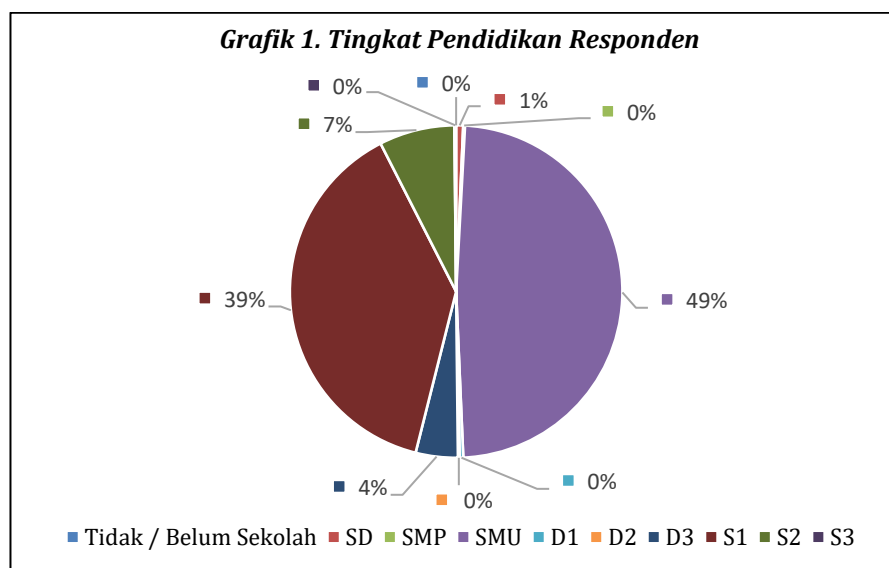
BAB 3

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

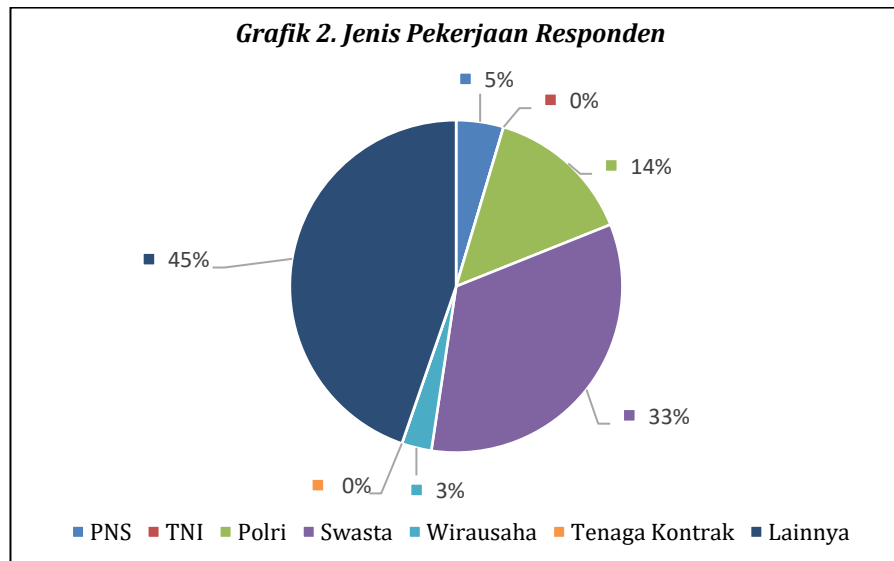
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan pengguna layanan di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B adalah sebagai berikut: SD berjumlah 4 (empat) orang, SMP berjumlah 1 (satu) orang, SMU berjumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang, Diploma 1 berjumlah 2 (dua) orang, Diploma 2 berjumlah 1 (satu) orang, Diploma 3 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, S1 berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) orang, S2 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, S3 berjumlah 1 (satu) orang, dan tidak / belum sekolah berjumlah 0 (tidak ada) orang.



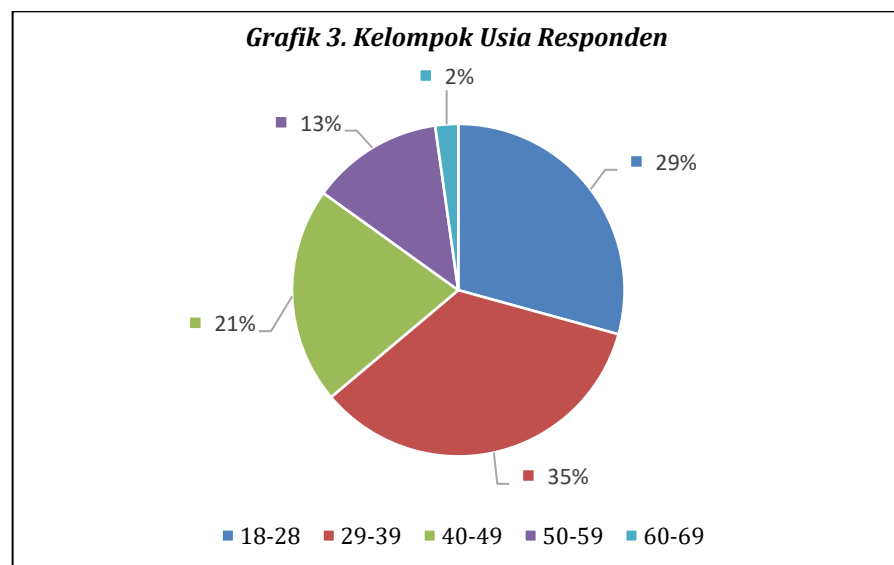
3.1.2. Jenis Pekerjaan Responden

Para responden memiliki jenis pekerjaan yang beragam, diantaranya sebagai PNS berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, TNI berjumlah 0 (tidak ada) orang, Polri berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang, Swasta berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) orang, Wirausaha berjumlah 17 (tujuh belas) orang, Tenaga Kontrak berjumlah 0 (tidak ada) orang, dan Lainnya berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) orang.



3.1.3. Kelompok Usia Responden

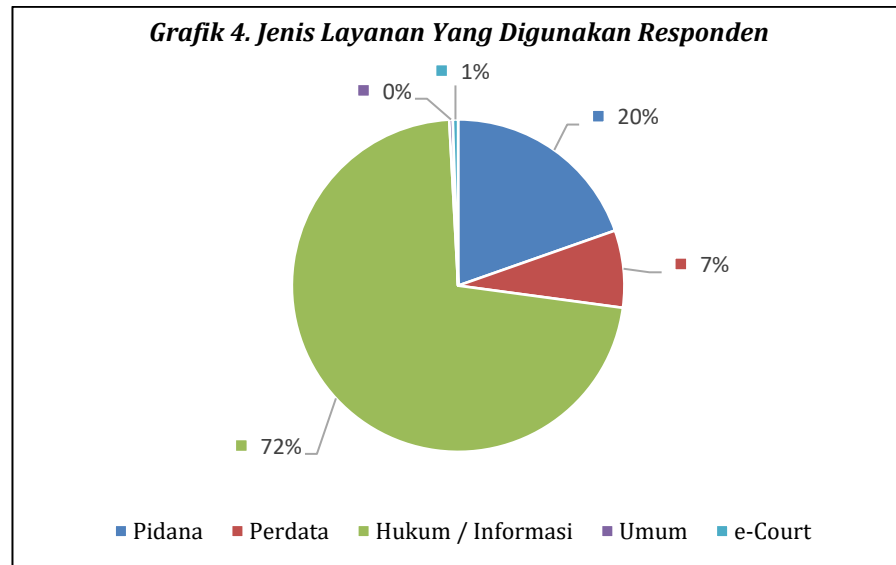
Kelompok usia pengguna layanan yang menjadi responden dalam rentang usia 18-28 tahun berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) orang, 29-39 tahun berjumlah 202 (dua ratus dua) orang, 40-49 tahun berjumlah 123 (seratus dua puluh tiga) orang, 50-59 tahun berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang, 60-69 tahun berjumlah 13 (tiga belas) orang.



3.1.4. Jenis Layanan

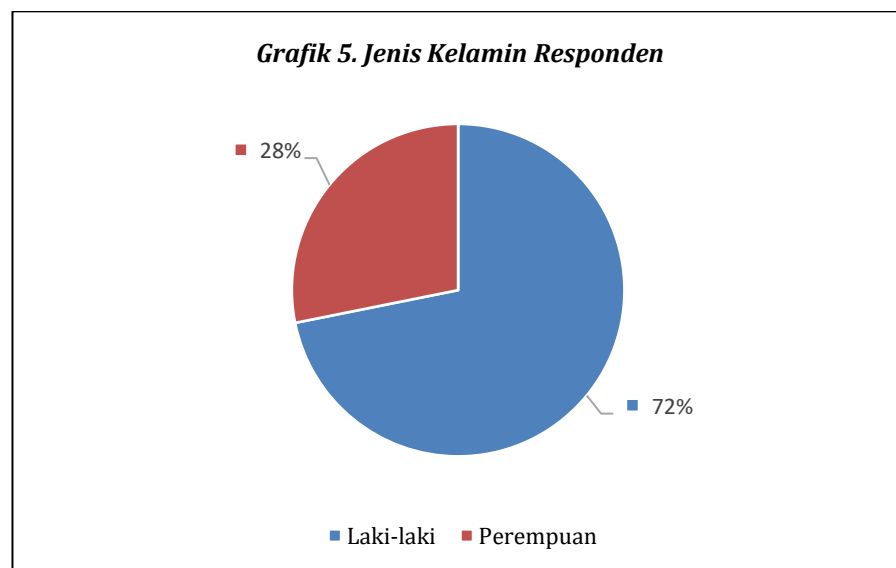
Jenis layanan pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang digunakan oleh para responden meliputi Layanan Pidana berjumlah 115 (seratus lima belas) layanan, Layanan Perdata berjumlah 44 (empat puluh empat) layanan, Layanan Hukum / Informasi berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) layanan, Layanan Administrasi Umum 2 (dua) layanan, Layanan e-Court

berjumlah 3 (tiga) layanan.



3.1.5. Jenis Kelamin Responden

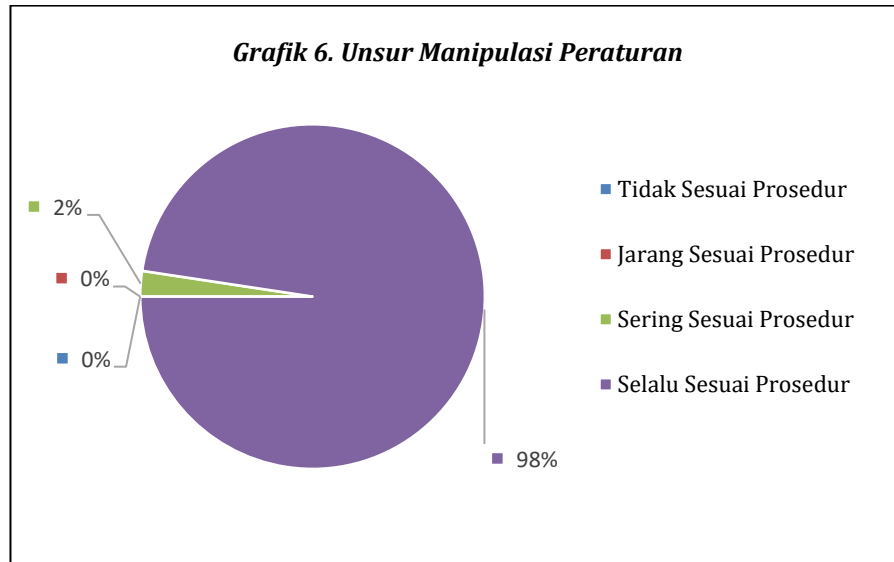
Pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang dijadikan sebagai responden survei terdiri dari 421 (empat ratus dua puluh satu) pengguna layanan berjenis kelamin laki-laki dan 165 (seratus enam puluh lima) pengguna layanan berjenis kelamin perempuan.



3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur

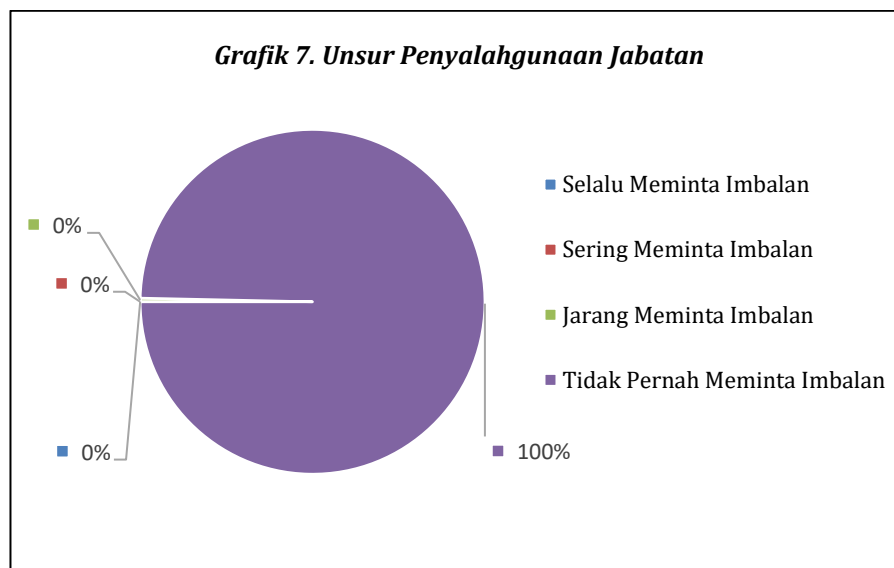
3.2.1. Unsur Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Manipulasi Peraturan menunjukkan nilai indeks sebesar 3,976. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dari manipulasi peraturan.



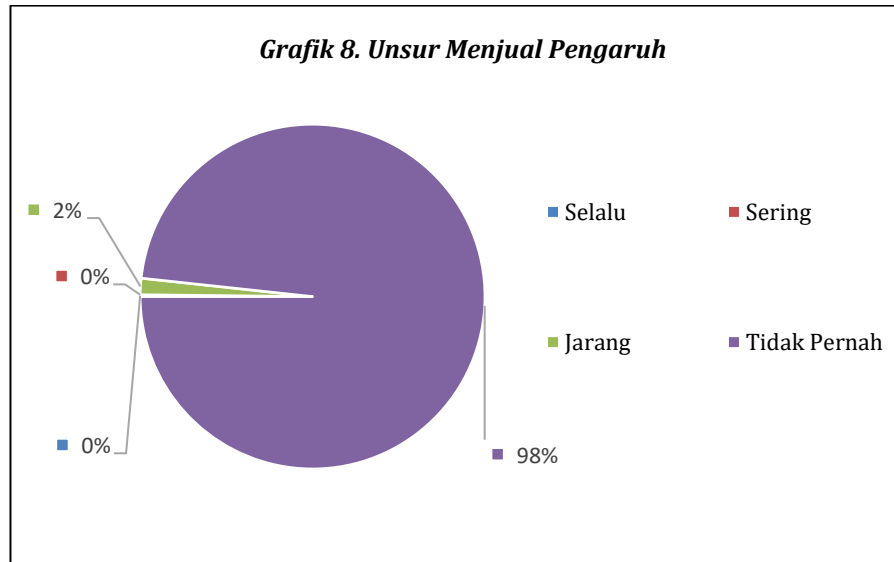
3.2.2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan nilai indeks sebesar 3,997. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dari penyalahgunaan jabatan.



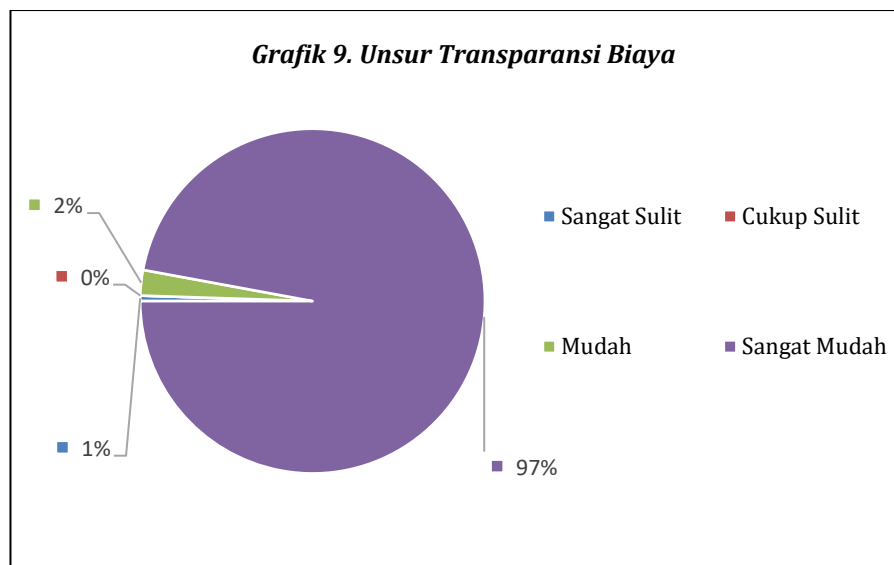
3.2.3. Unsur Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Menjual Pengaruh menunjukkan nilai indeks sebesar 3,980. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh.



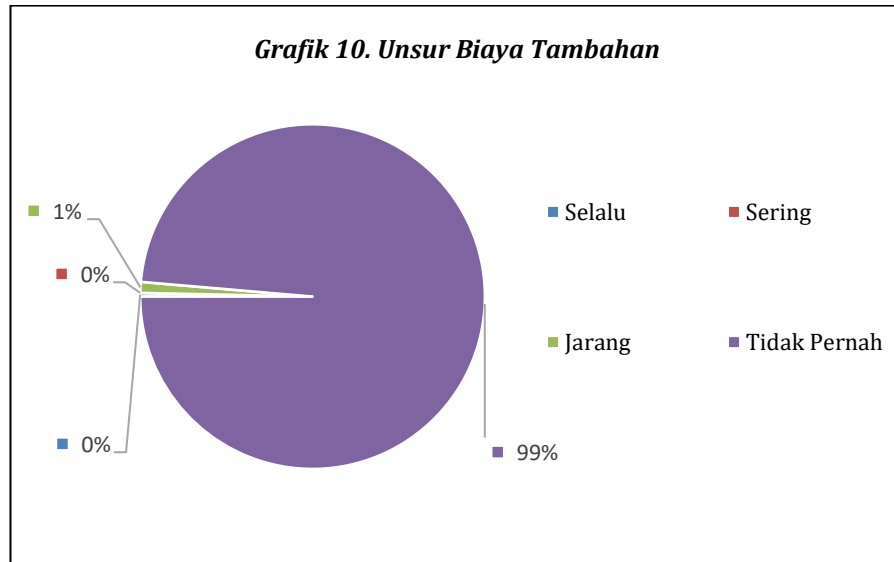
3.2.4. Unsur Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Transparansi Biaya menunjukkan nilai indeks sebesar 3,961. Dapat diartikan bahwa biaya yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B sudah transparan.



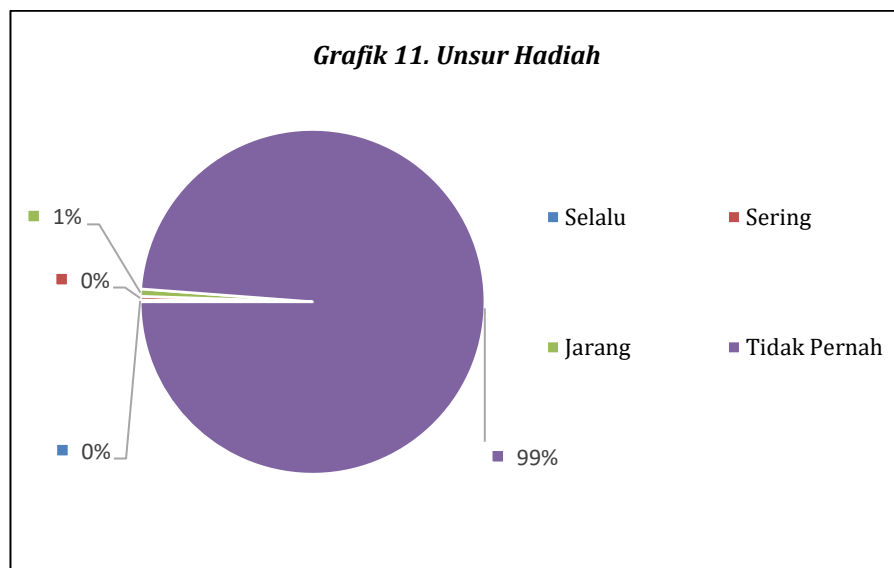
3.2.5. Unsur Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Biaya Tambahan menunjukkan nilai indeks sebesar 3,980. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B tidak menerapkan adanya biaya tambahan.



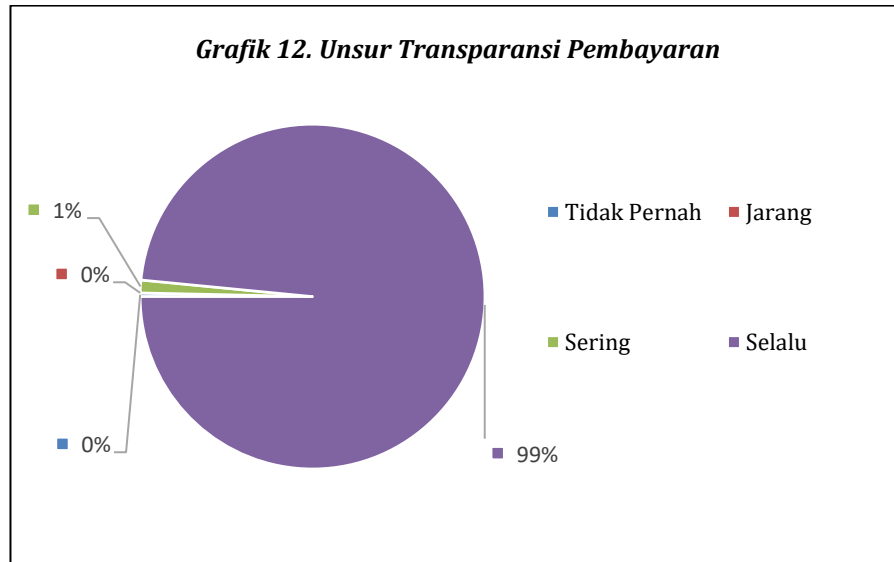
3.2.6. Unsur Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Hadiah menunjukkan nilai indeks sebesar 3,981. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B tidak menerima hadiah dari pihak manapun.



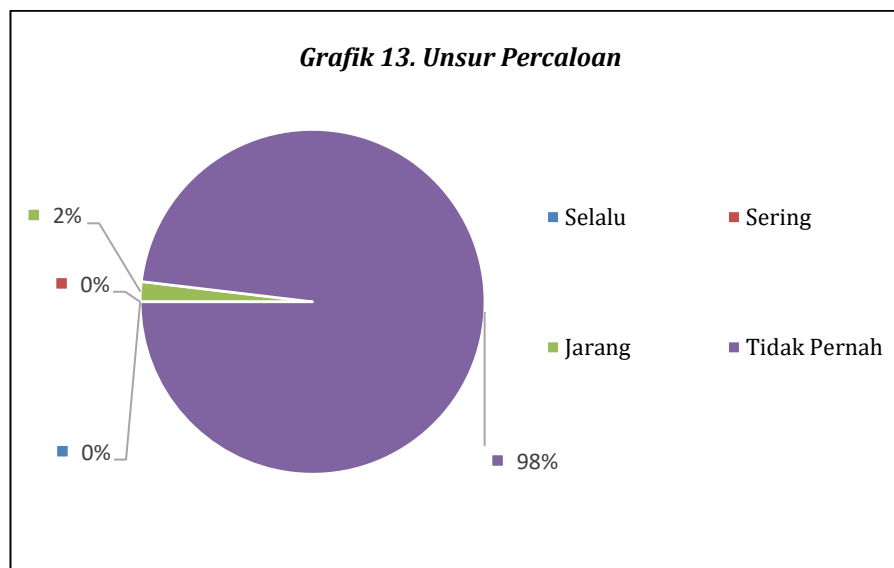
3.2.7. Unsur Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Transparansi Pembayaran menunjukkan nilai indeks sebesar 3,978. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B transparan dalam pengelolaan pembayaran atas layanan yang diberikan.



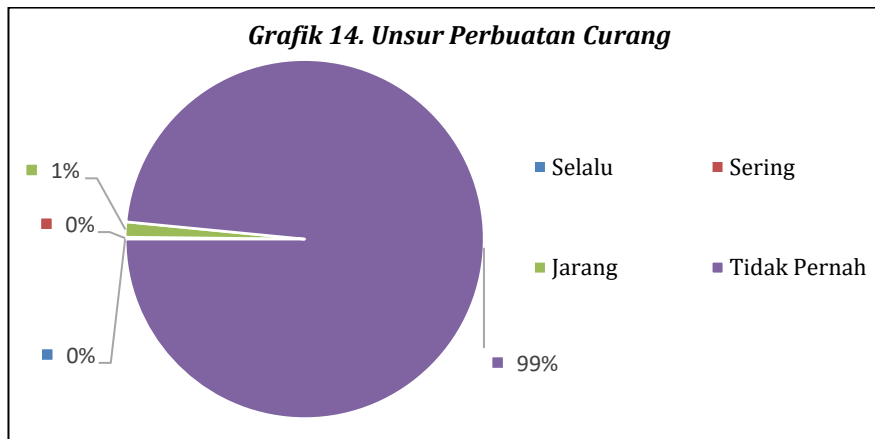
3.2.8. Unsur Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Percaloan menunjukkan nilai indeks sebesar 3,981. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dari tindakan Percaloan.



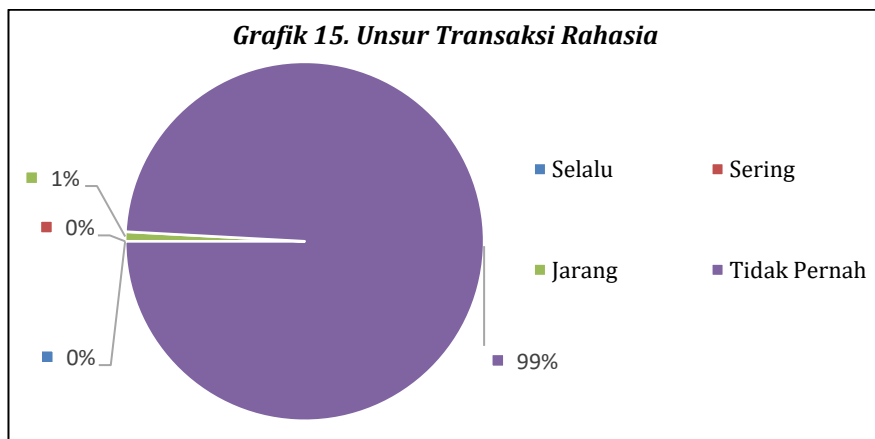
3.2.9. Unsur Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Perbuatan Curang menunjukkan nilai indeks sebesar 3,983. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dari perbuatan curang.



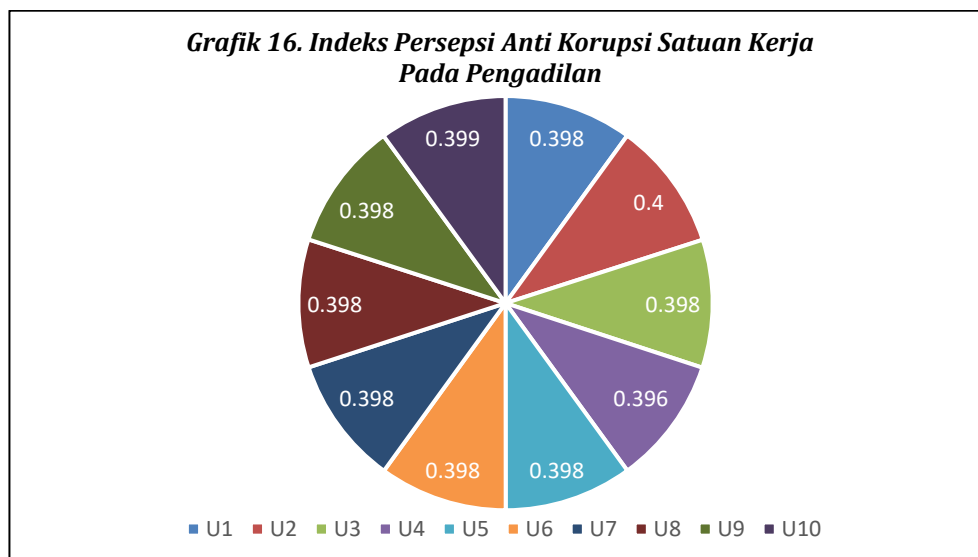
3.2.10. Unsur Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil indeks persepsi pengguna layanan pada Unsur Transaksi Rahasia menunjukkan nilai indeks sebesar 3,991. Dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B bersih dari adanya transaksi rahasia.



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Total indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang diperoleh dari 10 (sepuluh) unsur tersebut di atas adalah sebesar **3,98**.



Indeks 3,98 tersebut jika dikonversikan menurut Nilai Interval Konversi IPAK berada pada angka **99,52** sehingga kinerja unit pelayanan terpadu Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B **bersih dari korupsi**.

Tabel 4. Nilai Interval Konversi IPAK Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan *output* berupa skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B. Adapun masukan dari para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B

No.	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B
1	Pelayanan sangat baik
2	Semoga kedepannya lebih maju dan untuk pelayanan sangat memuaskan
3	Duta <i>nyo baek nian</i> , sangat terkesan. (Dutanya baik sekali, sangat terkesan)
4	Sangat puas dengan pelayanan di Pengadilan Negri

3.5. Nilai Unsur Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dari Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Periode 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023, yaitu:

Tabel 6. Nilai 3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata
1	Penyalahgunaan Jabatan "Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalagunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?"	2342	3,997

2	Transaksi Rahasia “Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?”	2339	3,991
3	Perbuatan Curang “Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?”	2334	3,983

Nilai 3 (tiga) unsur terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Periode 3 April 2023 sampai dengan 27 Juni 2023, yaitu:

Tabel 7. Nilai 3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata
1	Transparansi Biaya “Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif / biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?”	2321	3,961
2	Manipulasi Peraturan “Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?”	2330	3,976
3	Transparansi Pembayaran “Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)”	2331	3,978

BAB 4 PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B memiliki total Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,98 atau jika dikonversikan menurut Nilai Interval Konversi IPAK berada pada angka 99,52. Indeks persepsi tersebut merupakan gabungan indeks dari 10 (sepuluh) unsur yang masing-masing sebagai berikut:

Tabel 8. Indeks Per Unsur

No	Unsur	Kategori	Indeks
1.	Manipulasi Peraturan	Bersih dari korupsi	3,976
2.	Penyalahgunaan Jabatan	Bersih dari korupsi	3,997
3.	Menjual Pengaruh	Bersih dari korupsi	3,980
4.	Transparansi Biaya	Bersih dari korupsi	3,961
5.	Biaya Tambahan	Bersih dari korupsi	3,980
6.	Hadiah	Bersih dari korupsi	3,981
7.	Transparansi Pembayaran	Bersih dari korupsi	3,978
8.	Percaloan	Bersih dari korupsi	3,981
9.	Perbuatan Curang	Bersih dari korupsi	3,983
10.	Transaksi Rahasia	Bersih dari korupsi	3,991

Dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) unsur Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B, terdapat 3 (tiga) unsur yang mendapat nilai tertinggi yaitu Unsur Penyalahgunaan Jabatan, Transaksi Rahasia, dan Perbuatan Curang, sedangkan 3 (tiga) unsur yang mendapat nilai lebih rendah dibandingkan unsur lainnya yaitu Unsur Transparansi Biaya, Manipulasi Peraturan, dan Transparansi Pembayaran.

DAFTAR RUJUKAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

LAMPIRAN



Kuesioner Survei Persepsi Anti Korupsi

Nama Lengkap / Inisial

Jenis Kelamin

Pendidikan

Pekerjaan

Manipulasi Peraturan

Apakah Pelayanan Oleh Petugas di Pengadilan Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Yang Belaku

- Tidak Sesuai Prosedur
- Jarang Sesuai Prosedur
- Sering Sesuai Prosedur
- Selalu Sesuai Prosedur

Penyalahgunaan Jabatan

Apakah Dalam Memperoleh Layanan Pengadilan Secara Cepat dan Mudah, Ada Penyalahgunaan Jabatan Dari Petugas Untuk Meminta Imbalan Tertentu

- Petugas Yang Melayani Selalu Meminta Imbalan
- Petugas Yang Melayani Sering Meminta Imbalan
- Petugas Yang Melayani Jarang Meminta Imbalan
- Petugas Yang Melayani Tidak Pernah Meminta Imbalan

Menjual Pengaruh

Pernahkah Dihubungi Oleh Seseorang (Karyawan Pengadilan) Yang Akan Membantu Dalam Pengurusan Surat / Berkas Perkara

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Transparansi Biaya

Apakah Selalu Mudah Dalam Mendapatkan Informasi Tentang Tarif / biaya Baik Melalui Website Atau pun Petugas Layanan Di Pengadilan

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Biaya Tambahan

Apakah Di Pengadilan Selalu membayar Sesuai Tarif Resmi Tanpa Ada Biaya Tambahan

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Hadiah

Apakah Memberikan Tanda Terimakasih Atas Layanan Yang Diterima Di Pengadilan (Meskipun Tidak Diminta)

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Pernah

Transparansi Pembayaran

Apakah Menerima Bukti Transaksi Keuangan / Pembayaran Yang Sah Setelah Proses Pembayaran di Pengadilan Dilakukan

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Percaloan

Apakah Pernah Mengetahui Ada Praktek Percaloan Dalam Pengurusan layanan Di Pengadilan

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

Perbuatan Curang

Apakah Pernah Melihat dan atau Mendengar Masih Terjadi praktek KKN di Pengadilan

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

Transaksi Rahasia

Apakah Pernah Mengurus Perkara melalui Hakim/ Panitera / Staf Pengadilan Diluar Persidangan

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

Usul / Saran Perbaikan

Simpan Batal

570	Maswan	Sumatera Selatan	37 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
571	Ketut Wijaya	Sumatera Selatan	43 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
572	M. Syahramon Rizki	Sumatera Selatan	21 Tahun	SMU / Polri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
573	Ahmad Susanto	Sumatera Selatan	28 Tahun	S1 / Polri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
574	Ilham Kurnia Perdana	Sumatera Selatan	27 Tahun	SMU / PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
575	Zanti Sismsita	Sumatera Selatan	34 Tahun	SMU / Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
576	Yesi Oktamala	Sumatera Selatan	36 Tahun	SMU / Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
577	Annas Al Qodri	Sumatera Selatan	28 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
578	Sujarwo	Sumatera Selatan	58 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
579	Hajat Usman	Sumatera Selatan	58 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juni 2023
580	Surya Abdi Juliansyah	Sumatera Selatan	27 Tahun	S1 / PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
581	Dwi	Sumatera Selatan	22 Tahun	SMU / Swasta	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	27 Juni 2023
582	Melia Agustina Audia	Sumatera Selatan	47 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
583	Ibrahim	Sumatera Selatan	39 Tahun	SMU / Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
584	Saadatus Saniyah	Sumatera Selatan	22 Tahun	S1 / Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
585	Wahadi	Sumatera Selatan	47 Tahun	SMU / Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
586	Kristina Oktavia	Sumatera Selatan	21 Tahun	Diploma 3 / Lainnya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juni 2023
Jumlah					2330	2342	2332	2321	2332	2333	2331	2333	2334	2339	
Nilai Rata-Rata					3,976	3,997	3,980	3,961	3,980	3,981	3,978	3,981	3,983	3,991	39,807
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0,398	0,400	0,398	0,396	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,399	
Jumlah Nilai Rata-Rata														3,981	
Indeks Persepsi Anti Korupsi														3,98	

Rekapitulasi Nilai Per Unsur

Bobot IPAK	Nilai	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Tidak Baik	1	0	0	1	3	2	1	2	0	0	0
Kurang Baik	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
Baik	3	14	2	9	14	6	4	7	11	8	5
Sangat Baik	4	572	584	576	569	578	579	577	575	577	581

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsur

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI BATURAJA

NILAI INDEKS

3,98 / 99,52 %

Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

JUMLAH	586 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 421 ORANG	
	PEREMPUAN : 165 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 1 ORG
	SD : 4 ORG	Diploma 3 : 24 ORG
	SMP : 1 ORG	S1 : 226 ORG
	SMU : 284 ORG	S2 : 43 ORG
	Diploma 1 : 2 ORG	S3 : 1 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 27 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 17 ORG
	POLRI : 84 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 262 ORG	

Copyright © 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 8.6187, Penggunaan Memori : 2.6MB

Indeks Total Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

- o Register Responden IPAK
- o Kesan & Pesan Responden
- o **Perhitungan Indeks**
- o Register Tindak Lanjut

SKM >

Survey Harian >

Survey Zona Integritas >

4 Tidak Baik 25,00 - 43,75 1,00 - 1,75

Pilih Satuan Kerja Periode **Triwulan *** Pilih Periode 2023 Tampilkan Data

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total Data Umum Responden **Data Domisili Responden** Data Umur Responden Data Layanan Nilai Per Unsur

Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1 SUMATERA SELATAN	585
2 LAMPUNG	1

Copyright © 2023 [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum](#) All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 8.6187, Penggunaan Memori : 2.6MB

Data Domisili Responden Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +


Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Survey Harian >

Survey Zona Integritas >

«

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

 [Preview Publikasi](#)

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden **Data Umur Responden** Data Layanan Nilai Per Unsur

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	171	29,28
29 - 39 Th	202	34,59
40 - 49 Th	123	21,06
50 - 59 Th	75	12,84
60 - 69 Th	13	2,23
Total	584	

Copyright © 2023 [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum](#) All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 8.6187, Penggunaan Memori : 2.6MB


Data Umur Responden Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Triwulan *

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

 [Preview Publikasi](#)

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden **Data Layanan** Nilai Per Unsur

	Layanan	Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana	115
2	Layanan Perdata	44
3	Layanan Hukum / Informasi	422
4	Layanan Administrasi Umum	2
5	Layanan e-Court	3

Copyright © 2023 [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum](#) All Rights Reserved. Waktu Eksekusi : 8.6187, Penggunaan Memori : 2.6MB

Data Layanan untuk Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	2330	2342	2332	2321	2332	2333	2331	2333	2334	2339	
NRR Per RL	3,976	3,997	3,980	3,961	3,980	3,981	3,978	3,981	3,983	3,991	39,807
NRR Tertimbang	0,398	0,400	0,398	0,396	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,399	3,981
IPAK Unit Pelayanan											3,98

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	2321
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	2330
3	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	2331

Nilai Per Unsur dan Evaluasi 3 Nilai Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | x +

Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

Indeks Total Data Umum Responden Data Domisili Responden Data Umur Responden Data Layanan **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	2330	2342	2332	2321	2332	2333	2331	2333	2334	2339	
NRR Per RL	3,976	3,997	3,980	3,961	3,980	3,981	3,978	3,981	3,983	3,991	39,807
NRR Tertimbang	0,398	0,400	0,398	0,396	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,399	3,981
IPAK Unit Pelayanan											3,98

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	2342
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	2339
3	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	2334

Nilai Per Unsur dan Evaluasi 3 Nilai Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Periode Triwulan II Tahun 2023